



Wali Kota Didesak Batalkan Kenaikan PBB

YOGYAKARTA - Fraksi PDIP DPRD Kota Yogyakarta menyatakan, tidak setuju dengan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta yang akan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Karena kenaikan PBB tersebut, justru akan memberatkan masyarakat.

Oleh karena itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta, Dedi Jati Setiawan, mendesak agar Wali Kota membatalkan kenaikan PBB tersebut. Sebab kenaikan itu, menurut dia, sangat meresahkan warga Kota Yogyakarta. Buktinya, beberapa hari ini masyarakat resah akibat kebijakan sepihak tersebut.

Setelah mencermati dan mendengarkan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat Yogyakarta, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan, prihatin dan sedih yang mendalam akibat Pemkot Yogyakarta yang menaikkan PBB.

"Kenaikan PBB ini nyata-nyata membuat rakyat menderita. Belum semua haknya rakyat dipenuhi Pemkot sudah menaikkan PBB. Kami lihat masih ada kemiskinan dan pengangguran belum lagi masalah ketidaktentraman dan keamanan. Kami juga menyayangkan Pemkot tidak mengajak bicara DPRD dan tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat," katanya.

Untuk itu, pihaknya bersama masyarakat Yogyakarta mendesak Pemkot segera membatalkan kenaikan PBB dan mendesak Wali Kota untuk mengungkap tentang

potensi pendapatan asli daerah. "Harus dilakukan audit pendapatan asli daerah," ujar Dedi Jati Setiawan di DPRD Yogyakarta, Senin (24/2).

Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta Endro Sulaksono menambahkan, aspirasi masyarakat juga menghendaki Wali Kota membatalkan PBB untuk rakyat miskin yang jumlahnya masih banyak. "Hal ini penting untuk memastikan kenaikan kesejahteraan masyarakat dalam penciptaan lapangan kerja," ujar Endro Sulaksono.

Advokasi
Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Dedi Jati Setiawan juga menambahkan, Fraksi PDI Perjuangan membuka Pos Aduan Rakyat di Kantor Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta. Selain itu, juga mengukuhkan setiap anggota fraksi untuk melakukan advokasi bagi rakyat.

"Kami akan buka posko aduan ini di Kantor Fraksi PDI Perjuangan

DPRD Kota Yogyakarta. Masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya selama jam kerja. Kami akan sambut dan berjuang bersama hingga Pemkot kaji ulang kebijakan menaikkan PBB yang membuat gaduh ini," kata Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta Dedi Jati Setiawan.

Terpisah, Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Susanto Dwi Antoro mendukung kebijakan PDI Perjuangan yang membela masyarakat ini segera akan memanggil dinas terkait termasuk untuk menanyakan soal warga Yogyakarta yang terkena kenaikan PBB.

"Prinsipnya kami akan bergerak dalam satu tarikan nafas dengan hatinya rakyat. Setop kenaikan pajak ini. Kami akan undang juga instansi terkait juga untuk memberikan keterangan secara jujur pendapatan Pemkot selama ini. Kami juga akan cari tahu apakah terjadi potensi keborosan dalam pendapatan ini?" kata Susanto Dwi Antoro. (sgt-33)

Instansi

1.
2.
3.
4.
5.

ada beberapa hal kenaikan-kenaikan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat," ucapnya.

Menurut Oleg, kenaikan pembayaran PBB ini meresahkan masyarakat. Lantaran juga berbarengan dengan kenaikan PDAM, Listrik dan beberapa kebutuhan mendasar lainnya. Namun Khusus kenaikan PBB ini menjadi sorotan tajam Komisi B DPRD Jogja. Meski keringanan telah diberikan stimulan 20-70 persen agar tidak memberatkan. "Kami minta Pemkot meninjau ulang kenaikan ini," tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Jogja, Wasesa menuturkan syarat pengurangan umum diklaim sudah dibuat sesederhana mungkin dan tidak menyulitkan masyarakat. "Syaratnya sudah sederhana, tidak ada yang sulit," katanya, dihubungi Radar Jogja.

Dia enggan menjelaskan, terkait prosentase pengurangan secara teknis dari Pemkot untuk mengetahui atau survei WP dalam menentukan prosentase pengurangan tersebut. "Hitungannya sangat teknis," elaknya.

Sebelumnya, dia pernah menjelaskan masyarakat yang bisa mengajukan keringanan baik badan maupun perorangan yang tidak mampu membayar kewajibannya. Seperti Veteran, Pensiunan, Cagar Budaya, Warga tidak mampu, Pendidikan, Kesehatan, Konservasi, maupun Tanah Pertanian. (wia/prs/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005